

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Dinamika hubungan diplomatik Indonesia dengan Jepang telah mengalami berbagai perkembangan, mulai dari masa penjajahan, kerjasama ekonomi hingga bidang politik dan keamanan. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru lebih diarahkan untuk mencari sumber bantuan luar negeri dan oleh karenanya diplomasi Indonesia setelah tahun 1967 juga diarahkan untuk menstabilkan ekonomi Indonesia, setelah masa Orde Lama yang sama sekali menolak bantuan asing. Indonesia telah menjadikan Jepang sebagai bagian penting dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia yang ditandai dengan pertemuan pertama konsorsium negara-negara donor untuk Indonesia diadakan di Jepang atas inisiatif Jepang sendiri. Masa dasawarsa setelahnya, Indonesia dan Jepang masih menjalin hubungan kerjasama yang baik karena posisi Jepang yang strategis dalam pengaruhnya selama proses pembangunan Indonesia.

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Jepang cenderung kepada kerjasama ekonomi, Indonesia berperan sebagai supplier bahan mentah bagi Jepang, sementara Jepang yang akan mengolah bahan tersebut untuk dijadikan komoditi yang lebih bernilai. Meskipun hubungan antara Indonesia dengan Jepang tersebut selalu bersifat asimetris yaitu tidak sejajar dan saling melengkapi, namun perolehan yang didapat Indonesia dari Jepang telah banyak membantu proses pembangunan di Indonesia.

Pada tahun 1995 Badan Lingkungan Hidup Jepang mengadakan penelitian mengenai perkembangan kegiatan perusahaan Jepang di luar negeri yang

memperhatikan masalah lingkungan hidup. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa antara 211 perusahaan produsen Jepang yang bekerja sama untuk penelitian tersebut, Mayoritas perusahaan Jepang yang ada di Indonesia bergerak di bidang industri manufakturing.

Dengan tingginya tingkat industri yang dilakukan oleh Jepang, tentunya hal tersebut menimbulkan peningkatan emisi yang sangat tinggi yang kemudian menimbulkan isu lingkungan. Hal tersebut tentunya menuai reaksi dari belahan dunia. Karena sejalan dengan kondisi dunia yang dianggap telah berada di era globalisasi, maka faktor lingkungan hidup tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan selain hanya untuk mencapai kepentingan nasional. Isu utama dalam masalah lingkungan ini adalah masalah Global Warming, yang dimana hal tersebut telah mengakibatkan terganggunya stabilitas iklim dunia.

Dalam rangka untuk menghadapi perubahan iklim masyarakat Internasional yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan konferensi mengenai perubahan iklim di New York pada tahun 1992 yang mendasari terciptanya Protokol Kyoto pada tahun 1997 dan beberapa konferensi-konferensi. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang mengikat negara-negara di seluruh dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Jepang sebagai negara penghasil polutan terbesar di dunia dan juga termasuk dalam kategori negara Annex-1 dalam Protokol Kyoto telah menyadari dan telah merasakan dampak dari pemanasan global tersebut merasa bertanggung jawab terhadap kondisi ini. Jepang akan mengurangi emisi tetapi tidak ingin

mengurangi tingkat industrinya karena penurunan kapasitas industri dapat menyebabkan penurunan ekonomi di negaranya.

Dengan kondisi seperti itu tentunya cara yang paling tepat untuk menanggulangi isu lingkungan dalam penurunan emisi adalah dengan cara bekerjasama dengan negara berkembang yang memiliki hutan tropis besar dan meminta kepada negara berkembang untuk menjaga serta melestarikan hutan yang dimiliki guna memelihara karbon, tentunya dengan mekanisme perdagangan karbon.

Jepang memilih Indonesia sebagai salah satu mitra dalam kerjasama tersebut karena Jepang menilai Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki jumlah luasan hutan tropis yang cukup luas. Sekitar 86-93 juta ha tutupan hutan yang dimiliki, Indonesia mempunyai potensi tinggi sebagai area penyimpanan cadangan karbon yang bermanfaat bagi penurunan emisi GRK.

Pada tahun 2013 Jepang dan Indonesia menyepakati program yang berorientasi terhadap pengimplementasian Protokol Kyoto yang dimana Jepang merupakan negara Annex-1 dan memiliki tanggung jawab untuk mengurangi emisinya. Maka dari itu terjalinlah kerjasama perdagangan karbon antara Indonesia dengan Jepang secara bilateral.

Clean Development Mechanism (CDM) merupakan salah satu jenis mekanisme pasar dalam Protokol Kyoto yang masuk ke dalam kategori *crediting*. CDM merupakan mekanisme penyedia kredit karbon yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan melibatkan proyek-proyek rendah emisi gas rumah kaca di negara berkembang. Dengan begitu kerjasama perdagangan karbon

yang dilakukan antara Indonesia dengan Jepang yaitu menggunakan skema CDM. Dalam skema ini, Indonesia dengan Jepang menggunakan dua mekanisme yaitu mekanisme REDD dan JCM.

Melalui mekanisme REDD Indonesia dengan Jepang mengimplementasikannya dengan cara membuat proyek mitigasi lingkungan yang dikenal dengan 'Indonesia Japan Project for Development of REDD+' merupakan suatu program antara Pemerintah Indonesia (Kementerian Kehutanan) dan Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) yang bertujuan untuk membangun/mengembangkan mekanisme REDD+ di kawasan Kalimantan. Kemudian terjadi peluasan dengan menambahkan tiga areal strategis. Tiga areal strategis tersebut mencakup konservasi, SFM (sustainable forest management), aforestasi dan reforestasi yang menjadi bagian dari skema CDM.

Lalu melalui mekanisme JCM (*Joint Crediting Mechanism*) Indonesia dengan Jepang mengimplementasikannya dengan cara membuat proyek berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan rendah karbon yang dimana Jepang menyediakan modal proyek berupa fasilitas dana, teknologi, infrastruktur dan transportasi yang canggih dan memadai untuk dapat di terapkan di Indonesia. Proyek rendah karbon tersebut terdapat 9 proyek model, 1 proyek perencanaan dan 3 proyek kelayakan yang sudah diimplementasikan dan setiap tahunnya mengalami perkembangan, hingga pada tahun 2016 tercatat 108 studi kelayakan yang telah dilakukan dan total ada 23 proyek yang disetujui mendapatkan bantuan dana JCM, dengan total dana mencapai Rp 2 triliun.

Melalui kerjasama ini, Jepang dapat menyelesaikan tanggungjawabnya sebagai negara Annex-1 dan Indonesia mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut dengan lingkungan yang bersih, serta meningkatnya teknologi pabrik yang diperkenalkan dari Jepang dengan teknologi pembangunan rendah karbon.